

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN EKONOMI

Fathur Rahman Ramadhan *1
Marzila Putri ²
Jana Marvela ³

^{1,2,3} Program Studi: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : fathurrahman281003@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang dimanfaatkan pemerintah dalam mengatur kondisi perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia, dengan penekanan pada aspek pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, serta pemerataan distribusi pendapatan. Penelitian ini menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang peran kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna mewujudkan tujuan ekonomi yang diharapkan. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi. Kebijakan Fiskal Di Indonesia Merujuk Pada Kebijakan Pemerintah Yang Ditujukan Untuk Mengarahkan Ekonomi Suatu Negara Lewat Pengeluaran Serta Pendapatan Pemerintah. Lantas, Dari Sinilah Muncul Pertanyaan Mengenai Tentang Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Guna Mengelola Dan Mengarahkan Kondisi Perekonomian Ke Arah Yang Lebih Baik Atau Yang Diinginkan Dengan Cara Mengubah Atau Memperbarui Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah, Saalah Satu Hal Yang Ditonjolkan Dari Kebijakan Fiskal Ini Adalah Pengendalian Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Atau Negara.

Kata Kunci : fiskal, Ketimpangan, ekonomi

Abstract

Fiscal policy is one of the main tools used by the government to regulate economic conditions. This study aims to evaluate the impact of fiscal policy on the Indonesian economy, with an emphasis on aspects of economic growth, price stability, and income distribution equality. This study presents a comprehensive understanding of the role of fiscal policy in the Indonesian economy and offers policy recommendations that can be implemented to achieve the expected economic goals. This research method uses literature studies by collecting secondary data from various references such as journals, books, scientific articles, and official reports. Fiscal Policy in Indonesia Refers to Government Policy Aimed at Directing a Country's Economy Through Government Expenditures and Revenues. So, this is where questions arise regarding fiscal policy. Fiscal Policy Is an Economic Policy Carried Out by the Government in Order to Manage and Direct Economic Conditions in a Better or Desired Direction by Changing or Updating Government Revenues and Expenditures, One of the things that is highlighted from this Fiscal Policy is Control of Government or State Expenditures and Revenues

Keyword : Fiscal, Inequality, Economic

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan utama di berbagai negara, baik yang sedang berkembang maupun yang telah maju. Kondisi ini tercermin dari pembagian pendapatan dan kekayaan yang tidak seimbang, yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menghambat tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan fiskal sebagai alat utama. Melalui pengelolaan penerimaan negara, seperti pajak, dan belanja negara, seperti subsidi dan program bantuan sosial, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal yang dirancang secara adil dan tepat sasaran dapat mendorong terciptanya keadilan sosial serta memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi bagi kelompok yang kurang mampu. Namun, keberhasilan kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan sangat tergantung pada berbagai aspek, seperti kualitas perumusan kebijakan, kapasitas pelaksanaannya, serta

keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai peran dan efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi menjadi penting untuk mendukung penyusunan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal mengatasi resesi ekonomi fungsi kebijakan fiskal sangat berpengaruh pada ekonomi di Indonesia jika mampu menciptakan perubahan signifikan ukuran dalam sistem pengembangan Indonesia. Sentuhan ini pun dirasakan dalam pola kebijakan yang sebelumnya tersedia sangat sentralistik juga turut meraih reformasi melalui kebijakan desentralisasi. Menurut Rondinelli menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan kewajiban dan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada sektor swasta atau lembaga pemerintahan yang berada di bawahnya. Pada prinsipnya, perubahan kebijakan moneter ditentukan terutama oleh partisipasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ini adalah menurut peran pemerintah dalam menyadari kejadian umum pada rakyatnya. Namun, dalam implementasinya, pedoman fiskal akan diimplementasikan kebijakan fiskal yang diterapkan biasanya tanpa merencanakan dan tidak sesuai dengan pedoman induk, yaitu Konstitusi UUD 1945.

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang dimanfaatkan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian. Kebijakan ini meliputi pengelolaan pendapatan serta belanja negara, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Menurut Irawan (2023), kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara sosial, meningkatkan kesempatan kerja, serta menanggulangi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Kebijakan Ekonomi Suatu Negara Tidak Bisa Lepas Dari Campur Tangan Pemerintah, Karena Pemerintah Memegang Kendali Atas Segala Sesuatu Yang Menyangkut Semua Kebijakan Yang Bermuara Kepada Keberlangsungan Negara Itu Sendiri. Kebijakan Ekonomi Sangat Beragam Dan Bermacam-Macam Pula Kebijakannya. Oleh Sebab Itu, Pemerintah Wajib Menganut Salah Satu Kebijakan Ekonomi Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah. Apapun Sistem Ekonomi Yang Dianut Pemerintah, Maka Itulah Sistem Ekonomi Yang Terbaik Bagi Perekonomian Rakyat, Meskipun Nantinya Dalam Perjalanannya Memiliki Berbagai Kelemahan. Kebijakan Ekonomi Pasti Memiliki Fenomena Yang Berdampak Positif Dan Negatif, Salah Satu Dampak Negatif Yang Sering Terjadi Adalah Inflasi. Inflasi Merupakan Fenomena Yang Timbul Akibat Banyaknya Jumlah Uang Yang Beredar, Kenaikan Biaya Produksi, Besarnya Tarikan Permintaan Dari Konsumen, Dan Adanya Inflasi Tularan Dari Luar Negeri. Akibatnya Akan Mempengaruhi Perekonomian Didalam Negeri Dan Semakin Bertambahnya Pengangguran. Selain Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi, Juga Memiliki Dampak Positifnya, Yaitu Memudahkan Pemerintah Untuk Mengatur Perekonomian Dan Anggaran Pembelajaan Negara. Sehingga, Dengan Kebijakan Ini Maka Hasil Yang Didapatkan Digunakan Untuk Keperluan Didalam Negeri Dan Keperluan Rakyat.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal, sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya dengan tujuan pembangunan nasional, serta sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi kebijakan di berbagai level pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan kebijakan fiskal menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari kompleksitas sistem desentralisasi fiskal, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, hingga persoalan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dalam praktiknya kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ketimpangan dan memperkuat daya saing daerah secara merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan literature review sebagai metode utama untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Metode ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai referensi yang relevan, seperti artikel jurnal, buku akademik, laporan riset, data diperoleh dari hasil laporan pemerintah (APBN,BPS). Sumber data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari literatur yang membahas isu-isu seputar kebijakan fiskal, ketimpangan pendapatan, serta upaya redistribusi ekonomi. Analisis

dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap teori-teori yang ada, bukti empiris, serta praktik kebijakan dari berbagai negara guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam menanggulangi ketimpangan.

Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan negara (pajak). penelitian ini bertujuan menyusun analisis yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam konteks redistribusi pendapatan dan peningkatan keadilan ekonomi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan fiskal dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Ketimpangan

Kebijakan fiskal merupakan alat penting yang digunakan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Irawan (2023) menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mendorong peningkatan investasi serta mencapai tingkat investasi yang optimal dari sisi sosial. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan dan belanja negara memiliki peran besar dalam memengaruhi pergerakan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui instrumen seperti subsidi, transfer sosial, dan sistem perpajakan yang progresif. Dengan menyalurkan sumber daya secara lebih merata, kebijakan fiskal membantu menciptakan keadilan distribusi dan memperkuat stabilitas sosial.

Dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif, artinya semua orang, termasuk kelompok berpendapatan rendah dan daerah tertinggal, dapat merasakan manfaatnya. Misalnya, mengalokasikan belanja negara untuk membangun infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup orang miskin dan menciptakan peluang ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang.

Selain itu, sistem perpajakan yang progresif sangat membantu dalam redistribusi kekayaan. Pajak yang lebih tinggi diberikan kepada kelompok berpendapatan tinggi memungkinkan pemerintah untuk membiayai program sosial yang membantu orang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat penyeimbang yang memperkuat dasar ekonomi dan mengurangi disparitas sosial. Dalam jangka panjang, pengelolaan fiskal yang berfokus pada pemerataan dan pembangunan berkelanjutan akan menghasilkan masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Kepercayaan sosial akan meningkat, kohesi nasional akan diperkuat, dan lingkungan investasi akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya merupakan alat ekonomi teknis, tetapi juga merupakan alat strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

peran pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Melalui penerimaan negara, terutama sistem perpajakan, pemerintah dapat menetapkan pajak yang bersifat progresif, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar secara proporsional. Hal ini memungkinkan redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui berbagai program sosial. Sementara itu, pada sisi pengeluaran negara, kebijakan fiskal diwujudkan dalam bentuk belanja sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai, program kesehatan dan pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi kelompok yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi ketimpangan struktural. Dengan desain dan pelaksanaan yang tepat, kebijakan fiskal mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak adil atau tidak tepat sasaran, justru dapat memperparah ketimpangan.

Aspek Yang Dapat Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan, yaitu :

a. Pajak Progresif

Tujuan utama dari pajak progresif adalah menciptakan keadilan distribusi, yaitu agar mereka yang berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembiayaan negara, sementara mereka yang berpenghasilan rendah dikenai tarif yang lebih ringan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Contohnya, jika penghasilan tahunan di bawah Rp50 juta dikenai pajak 5%, maka penghasilan Rp50–250 juta dikenai 15%, dan di atas Rp500 juta dikenai 30%. Dengan struktur seperti ini, beban pajak relatif lebih besar ditanggung oleh kelompok kaya.

Sistem pajak progresif umum digunakan dalam pajak penghasilan orang pribadi dan dianggap lebih adil dibandingkan pajak regresif, yang membebani semua orang dengan tarif yang sama terlepas dari kemampuan ekonominya.

b. Pajak Regresif

Pajak regresif adalah jenis pajak di mana tarif pajak yang dikenakan justru menjadi lebih besar secara proporsional bagi kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Dalam sistem ini, semua orang membayar jumlah pajak yang sama atau membayar tarif tetap, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya.

Contoh paling umum dari pajak regresif adalah pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Misalnya, seseorang yang berpenghasilan Rp1 juta dan membeli barang seharga Rp100 ribu dengan PPN 10% akan membayar Rp10 ribu, yang berarti 1% dari total penghasilannya. Sementara orang yang berpenghasilan Rp10 juta dan membeli barang yang sama juga membayar PPN Rp10 ribu, namun itu hanya 0,1% dari penghasilannya. Artinya, beban pajaknya lebih berat bagi orang miskin secara relatif.

Pajak regresif sering dianggap tidak adil secara sosial, karena membebani kelompok berpenghasilan rendah lebih besar dibanding kelompok kaya. Oleh karena itu, dalam sistem perpajakan modern, pajak regresif biasanya dikombinasikan dengan kebijakan kompensasi, seperti bantuan sosial atau subsidi untuk kelompok rentan, agar dampaknya terhadap ketimpangan dapat ditekan.

B. Kondisi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan besar dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

“Penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan juga menurun secara spasial, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023, dan tingkat kemiskinan di perdesaan turun ke 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terlihat di seluruh Indonesia, dengan Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami penurunan tertinggi. “Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388). Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang kuat dan berbagai program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah, terutama untuk mengatasi kenaikan inflasi pangan pada awal tahun 2024. Di tengah stagnasi perekonomian global, penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab ketimpangan ekonomi pada dasarnya tergantung dengan kondisi negara, akan tetapi pada umumnya ketimpangan ekonomi disebabkan oleh:

1. Tingkat pengangguran tinggi
2. Kondisi pekerjaan yang buruk
3. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
4. Diskriminasi ekonomi
5. Infrastruktur yang buruk
6. Ukuran Keluarga
7. Konsentrasi kekayaan

C. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Tingkat Ketimpangan

Kebijakan fiskal memiliki hubungan yang erat dengan tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara. Melalui instrumen fiskal, yaitu pajak dan belanja negara, pemerintah dapat memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Pajak yang bersifat progresif, seperti pajak penghasilan dengan tarif meningkat sesuai besarnya pendapatan, berfungsi untuk mengurangi ketimpangan karena membebani kelompok berpendapatan tinggi secara proporsional lebih besar. Sebaliknya, pajak regresif seperti pajak konsumsi justru bisa memperburuk ketimpangan karena membebani kelompok miskin secara relatif lebih berat. Di sisi lain, pengeluaran negara seperti subsidi, bantuan sosial, serta belanja untuk pendidikan dan kesehatan dapat mempersempit kesenjangan jika diarahkan secara tepat kepada kelompok rentan. Namun, jika alokasi belanja lebih menguntungkan kelompok mampu, misalnya melalui subsidi energi yang lebih dinikmati kelas menengah atas, ketimpangan justru dapat meningkat. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal dalam menekan ketimpangan sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang berpihak pada pembangunan inklusif, terutama melalui investasi di sektor sosial, berpotensi menurunkan ketimpangan struktural dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.

Namun, penerapan kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah. Kapasitas fiskal yang terbatas merupakan kendala utama, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki utang yang tinggi dan penerimaan pajak yang rendah. Di sisi lain, kebocoran anggaran, inefisiensi birokrasi, dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sering menjadi penghalang untuk efektivitas belanja negara. Tujuan redistribusi fiskal tidak tercapai ketika kelompok menengah atas mendapatkan lebih banyak subsidi atau program sosial. Selain itu, upaya untuk melakukan perubahan pajak progresif atau pengalihan subsidi yang lebih adil juga menghadapi tantangan yang signifikan dari elit ekonomi-politik dan kelompok berkepentingan. Tekanan politik ini sering membuat pemerintah enggan melakukan reformasi yang diperlukan.

D. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Fiskal

Tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal mencakup berbagai aspek, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Beberapa tantangan utama :

a. Kapasitas Fiskal yang Terbatas

Kebijakan fiskal membutuhkan banyak sumber daya, terutama berdasarkan pendapatan negara. Namun, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Ini disebabkan oleh pendapatan negara yang terbatas, terutama dari sektor pajak, yang membuat ruang fiskal menjadi sempit. Ini menghalangi pemerintah untuk memberikan stimulus atau ekspansi fiskal saat diperlukan, seperti saat ekonomi mengalami krisis.

b. Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Realisasi Anggaran

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal adalah ketidaksesuaian antara realisasi di lapangan dan rencana anggaran. Seringkali, anggaran diserap lebih lambat atau lebih rendah daripada yang diharapkan, meskipun APBN/APBD disusun secara

sistematis oleh pemerintah. Proses birokrasi yang lamban, tender proyek yang tertunda, atau kekurangan kemampuan teknis aparatur dapat menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, banyak program pembangunan dan layanan publik tidak berjalan dengan baik.

c. Inefisiensi dan Pemborosan Belanja Pemerintah

Belanja negara merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, belanja negara tidak selalu digunakan secara efektif dan efisien. Banyak laporan dan temuan audit mengungkap adanya inefisiensi serta pemborosan anggaran di berbagai sektor pemerintahan. Belanja negara tidak selalu digunakan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Pemborosan anggaran menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak proyek pembangunan gagal mencapai tujuan mereka, atau biayanya meningkat.

SIMPULAN

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Melalui instrumen seperti pajak progresif, belanja sosial, dan subsidi, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan guna menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sistem perpajakan yang adil dan alokasi anggaran yang tepat sasaran mampu mengurangi disparitas antar kelompok masyarakat dan wilayah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan fiskal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kapasitas fiskal yang terbatas, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta inefisiensi belanja negara. Untuk itu, perbaikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal sangat diperlukan agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami, penulis, menyampaikan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah kami terima selama proses penyusunan jurnal ini. Setiap kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah sangat membantu dalam kelancaran penulisan dan penyelesaian karya ini. Kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi penelitian dan kajian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Madakarah, Nafiriair Yufan, and Willem A. Makaliwe. 2023. "Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 4 (2): 158–69. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i2.132>.
- (Sari et al. 2024) Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, and Arif Fadilla. 2024. "Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1 (4): 1–10. <https://doi.org/10.47134/jae.v1i4.231>.
- (Huda et al. 2024) Huda, Roy Abdul, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, and Anas Malik. 2024. "SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : Royhuda03" 7 (2): 189–201.
- (Pendapatan et al. 2024) Pendapatan, Ketimpangan, Belanja Pendidikan, Belanja Bantuan Sosial, and Pajak Daerah. 2024. "Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia" 18 (1): 296–300.
- (Putri 2022) Putri, Osi Hayuni. 2022. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3 (2): 98–104.

<https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1506>.

(Lestari, Robiani, and Sukanto 2023)Lestari, Putri Indah, Bernadette Robiani, and Sukanto Sukanto. 2023. "Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11 (2): 1739-52. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4789>.

(*In It Together: Why Less Inequality Benefits All* 2015)*In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. 2015. *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. <https://doi.org/10.1787/9789264235120-en>.